

PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERBASISKAN SMART EDUKASI

Feby Milanie, Muammar Khaddafi, Adam Afiezan

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Universitas Malikussaleh, Indonesia

Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utaram Indonesia.

ABSTRACT

This study aims 1) to determine how much influence Economic Growth, Regional Original Income, and General Allocation Funds partially have a significant effect on Capital Expenditures in Regencies/Cities in North Sumatra. 2) to find out how much influence Economic Growth, Regional Original Income, and General Allocation Funds simultaneously have a significant effect on Capital Expenditures in Regencies/Cities in North Sumatra. This study uses the associative/quantitative method with the influence of economic growth, local revenue, and general allocation funds with a mathematical approach to answering the problem formulation. The results of the t-count study indicate that the variables of economic growth and general allocation funds have a partial effect on capital expenditures, while local revenue does not partially affect capital expenditures. The results of the f-count study indicate that the variables of economic growth, regional original income, and general allocation funds have a simultaneous effect on capital expenditure.

Keywords: *economic growth, regional original income, general allocation funds, and capital expenditures*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 2) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif/kuantitatif dengan metode pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dengan pendekatan secara matematis dalam menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian t hitung menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal. Hasil penelitian f hitung menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal.

Kata kunci: *pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal*

A. PENDAHULUAN

Pada Umumnya Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dengan peraturan perundang-undangan. Dimana undang-undang No. 23 Tahun 2014 ditetapkan secara sah di suatu daerah memiliki “Asas otonomi yang artinya prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah”.

Hal ini menimbulkan peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan (penyedia barang publik dan pembangunan ekonomi) di bidang pendidikan yang merupakan unsur esensial dalam pembangunan daerah dan menjadi salah satu kebutuhan penduduk. Namun, kemampuan daerah mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan sangat terbatas karena peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. Pasal 1 ayat (2) “Pedoman penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penerapan APBD”.

Tingkat pertumbuhan ekonomi salah satu tujuan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat. Sedangkan menurut P. Eko Prasetyo (2009) “Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan perkembangan suatu bangsa atau pembangunan ekonomi suatu bangsa”. Infrastruktur dan sarana prasarana di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan aman dan nyaman, maka akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya semakin meningkat dan infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha didaerah tersebut.

Perbaikan kesejahteraan terjadi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk dalam pembangunan ekonomi. Kenyataan yang terjadi di pemerintah daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan belanja modal, dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak positif terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini, maka pemerintah mengalokasikan dana

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana dikatakan dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. sehingga dengan kata lain Dana alokasi pada umumnya diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerah. Dimana yang diharapkan perbedaan kemampuan keuangan daerah yang maju dengan daerah yang berkembang dapat diperkecil.

Daerah Sumatera Utara merupakan tempat wisata yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara dimana dengan banyak kunjungan pariwisata hal ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota tersebut. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka belanja modal akan meningkat dan tidak akan ada lagi ketergantungan pada Pemerintah Pusat. Dana APBD di Sumatera Utara harus dipacu khususnya untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang menyangkut kepentingan masyarakat. Apalagi dana APBN yang tidak terpakai di daerah itu sendiri akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerahnya. Dimana klasifikasi data pertumbuhan ekonomi, dimana Pendapatan asli daerah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2017 pemerintah daerah sangat bergantung pada dana transfer baik berupa dana perimbangan maupun dana bagi hasil dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak dapat membiayai daerahnya sendiri.

B. LANDASAN TEORI

1. Pertumbuhan Ekonomi

Dimana bisa dideskripsikan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan *output* dalam waktu jangka panjang, apabila kegiatan ekonomi yang dihasilkan tambah besar maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi kesejahteraannya meskipun terdapat indikator lainnya. Badan Pusat Statistik (2010:3) “Indikator makro tersebut diantaranya adalah produk domestik regional bruto”. Menurut Putra (2009) “Pertumbuhan ekonomi ialah suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat”. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi dari satu periode, berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikut yang artinya jika produktivitas dari faktor-faktor yang dimasukkan dalam produksi menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Badan Pusat Statistik (2010:1) “Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat”.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB). Badan Pusat Statistik (2010:5) “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan”.

Perhitungan produk domestik regional bruto dibedakan menjadi dua, yaitu produk domestik regional bruto atas dasar harga merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010:5) menyatakan bahwa “Perhitungan produk domestik regional bruto dapat dilakukan dengan tiga pendekatan metode langsung yaitu:

- a. Pendekatan produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi *output* dari masing-masing sektor ekonomi dengan biaya antaranya. pendekatan ini merupakan pendekatan nilai tambah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi dari input. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.
- b. Pendekatan pendapatan adalah nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha seperti bunga, sewa tanah dan keuntungan. Metode pendapatan ini banyak digunakan pada sektor pemerintahan seperti jasa .
- c. Pendekatan pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir barang dan jasa di wilayah domestik. Produk Regional Domestik dihitung dengan cara menghitung komponen pengeluaran akhir yang membentuk.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah dan yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. pendapatan asli daerah memiliki tujuan untuk memberikan

kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai otonomi daerah dan dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi.

Defenisi Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri”. Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) “Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dipergunakan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya ditinjau dari segi daerah tetapi dapat dilihat dari kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk keperluan pengeluaran daerahnya sendiri seperti keperluan rutin. Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan hal yang dikehendaki bagi setiap daerah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Penyebab diberlakukannya otonomi daerah merupakan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah maka daerah dapat mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.

Jenis pendapatan ini dibagi menjadi beberapa yaitu:

- a. 1. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b. 2. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik negara/Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

4. Belanja Modal

Belanja modal adalah suatu pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap/investasi yang memberikan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bersifat untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat dan meningkatkan kapasitas serta kualitas aset.

Dimana dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 “Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk pembanguana dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah”. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Menurut Erlina, et,al (2015:155) “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal unuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud”. Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2012:107) “Belanja modal merupakan anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensi-potensi penerimaan daerah yang baru. Belanja yang baik merupakan dengan semakin besarnya porsi belanja modal sebagai bagian dari total belanja daerah. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah sesuai dengan anggaran dan pelayanan publik yang dapat memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap yaitu dengan membangun sendiri, menurkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun pemerintah daerah biasanya melakukan dengan car membeli aset tetap.

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi atas minimal kapasitas aset tetap dan aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang atau aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal dan merupakan syarat wajib dalam penepatan kapitalisasi atas pengadaan barang dan aset yaitu:

- a. Pengeluaran anggaran belanja modal mengakibatkan bertambahnya aset atau bertambahnya masa manfaat dan umur ekonomis aset berkenaan.
- b. Pengeluaran anggaran belanja modal mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja atau volume aset.

C. METODE PENELITIAN

1. Dasar Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif/kuantitatif. Menurut Rusiadi (2014:12), “Penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala”.

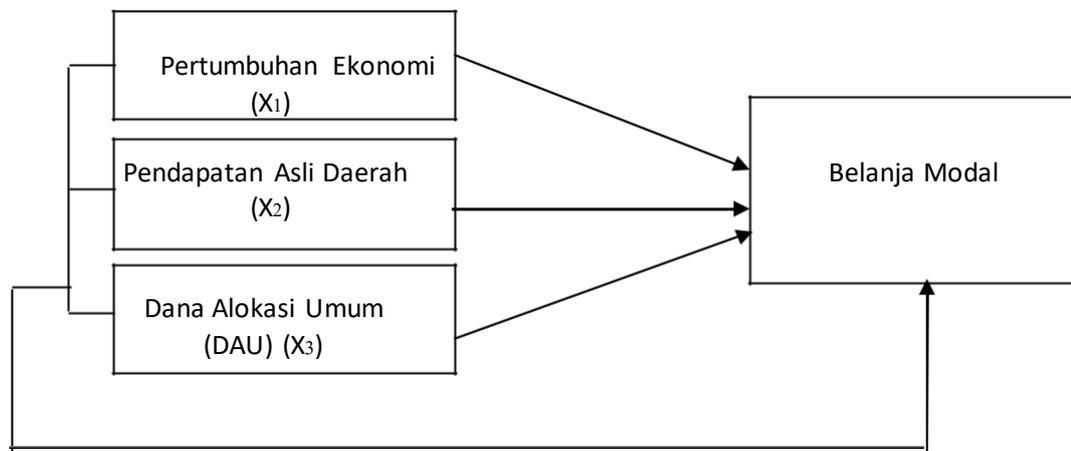
2. Kerangka Konseptual

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan pemerintah daerah untuk membangun ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada. P. Eko Prasetyo (2009) “Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan perkembangan suatu bangsa atau pembangunan ekonomi suatu bangsa”. Pendapatan Asli Daerah mempunyai peran dalam pelaksanaan otonomi daerah guna untuk mencapai dalam tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pelayanan publik ditunjukkan melalui sarana dan prasarana yang memadai untuk membuat masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman serta berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN dengan dialokasikan bertujuan untuk membiayai pemerataan keuangan antar daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran untuk pelaksanaan desentralisasi, data dana alokasi umum didapatkan dari laporan APBD kabupaten/kota di daerah tersebut.

Ardhani (2011) “Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan Dana Alokasi Umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal”.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya kerangka konseptual merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup penulisan ini adalah pada provinsi Sumatera Utara. Kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. Uji Asumsi Klasik

Dengan adanya asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dikatakan mendekati atau sama dengan kenyataan yang akurat. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar terbebas dari gejala heteroskedastisitas, gejala autokorelasi dan gejala multikolinieritas. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

- a. Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Cara mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :
- b. Jika titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
- c. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menunjukkan adanya hubungan linier antara variabel bebas dalam model regresi maupun untuk menunjukkan ada tidaknya derajat kolinieritas yang tinggi antara variabel-variabel bebas. Jika antar variabel berkorelasi dengan

sempurna maka disebut dengan multikolinieritas sempurna (*perfect multicollinearity*), berarti model kuadrat terkecil tersebut tidak bisa digunakan. Multikolinieritas dapat diketahui dengan menganalisis nilai toleransi serta *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu variabel dapat dikatakan terbebas dari asumsi multikolinieritas apabila nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2013).

d. Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji model regresi linier yang terdapat korelasi antara kesalahan. Menurut Jonathan Sarwono (2012:28) terjadi autokorelasi jika *durbin watson* sebesar < 1 dan > 3 . Secara umum kriteria yang digunakan adalah:

- 1) Jika $DU < DW < 4-DU$ maka H_0 diterima, artinya terjadi autokorelasi
- 2) Jika $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ maka H_0 ditolak, artinya tidak terjadi autokorelasi
- 3) Jika $DL < DW$ atau $4-DU < DW < 4-DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

Uji heteroskedastisitas merupakan cara untuk melihat adanya heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antar nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Deteksi dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang sudah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah *studentized*.

D. ANALISA DAN HASIL

1. Analisa Dasar

Adapun kabupaten yang ada di Sumatera Utara yaitu: Kabupaten Nias, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat. Sedangkan untuk wilayah kotanya yaitu: Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Padang Sidempuan, Kota Gunung Sitoli.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, untuk membentuk dinas-dinas sebagai institusi teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dinas-dinas tersebut terdiri atas: Dinas Pertanian, Dinas Pertenakan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan

dan Kelautan, Dinas Kesejahteraan dan Sosial, Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman, Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendapatan, Dinas Bina Marga, Dinas

Pengairan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas Komunikasi dan Informasi.

2. Deskripsi Variabel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 33 Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Sumatera. Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan kriteria khusus pengambilan sampel dipilih sebanyak 7 Kabupaten dan 3 Kota, dengan periode penelitian dilakukan mulai pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017. Data penelitian secara keseluruhan berjumlah 40 sampel (10 Kabupaten/Kota X 4 Tahun laporan realisasi APBD). Adapun variabel penelitian yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Pertumbuhan Ekonomi

Data variabel bebas (X1) dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, berikut ini data variabel Pertumbuhan Ekonomi :

Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2014-2017
(dalam Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
1	Kab Langkat	27.769.540.000	30.351.770.000	33.949.470.000	37.023.330.000
2	Kab Nias	2.430.720.000	2.669.900.000	2.996.280.000	3.233.750.000
3	Kab Tapanuli Selatan	9.308.330.000	10.105.980.000	10.946.770.000	11.983.060.000
4	Kab Simalungun	25.338.490.000	27.237.460.000	30.186.080.000	32.860.290.000
5	Kab Asahan	24.302.720.000	26.541.790.000	29.206.690.000	32.023.190.000
6	Kab Karo	13.817.090.000	15.150.360.000	16.728.420.000	18.060.750.000
7	Kab Dairi	6.268.080.000	6.823.160.000	7.433.620.000	8.044.630.000
8	Kota Binjai	7.643.410.000	8.447.410.000	9.077.470.000	9.857.850.000
9	Kota Tebing Tinggi	3.934.670.000	4.304.350.000	4.727.480.000	5.123.220.000
10	Kota Sibolga	3.426.510.000	3.827.170.000	4.262.850.000	4.644.670.000

Sumber : Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2019

48

Berdasarkan tabel diatas pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi terletak di Kabupaten Langkat sebesar Rp. 37.023.330.000, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terletak pada Kabupaten Nias sebesar Rp. 2.430.720.000. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi menurun, maka pendapatan daerah akan mengalami penurunan sehingga pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

a. Pendapatan Asli Daerah

Data variabel bebas (X2) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, berikut ini data variabel Pendapatan Asli Daerah:

Tabel 4.2 Pendapatan Asli Daerah Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2014-2017
(dalam Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
1	Kab Langkat	107.811.975.547	122.715.359.910	132.673.213.413	30.094.966.025
2	Kab Nias	65.082.210.841	70.892.590.608	82.840.434.009	63.612.593.279
3	Kab Tapanuli Selatan	95.588.202.103	109.349.451.811	76.640.675.841	47.990.183.868
4	Kab Simalungun	96.390.208.715	111.893.282.770	132.560.800.826	33.014.568.195
5	Kab Asahan	91.468.218.559	98.279.308.429	52.170.348.430	30.373.280.934
6	Kab Karo	72.914.095.471	87.644.277.141	99.913.302.299	40.831.129.979
7	Kab Dairi	53.525.854.131	58.791.848.521	68.003.241.760	37.587.326.567
8	Kota Binjai	71.967.137.635	78.327.792.811	97.339.497.584	27.476.734.295
9	Kota Tebing Tinggi	74.515.273.852	82.410.053.810	94.058.491.717	48.469.208.035
10	Kota Sibolga	52.922.967.441	60.486.785.863	68.537.902.708	34.557.335.546

Sumber : Data diperoleh dari Kementerian Keuangan Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel diatas pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi. Pendapatan asli daerah tertinggi terletak di Kabupaten Langkat sebesar Rp. 132.673.213.413, sedangkan pendapatan asli daerah terendah terletak di Kota.

Binjai sebesar Rp. 27.476.734.295. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat. Di Tahun 2017 Pemerintah Daerah tidak dapat membiayai daerahnya sendiri dan sangat bergantung pada dana perimbangan.

b. Dana Alokasi Umum

Data variabel bebas (X3) dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum, berikut ini data variabel Dana Alokasi Umum:

Tabel 4.3 Dana Alokasi Umum Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2014-2017
(dalam Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
1	Kab Langkat	1.039.650.946.000	1.099.486.754.000	1.200.481.463.000	700.280.826.000
2	Kab Nias	347.698.829.000	365.879.173.000	429.582.510.000	244.748.649.576
3	Kab Tapanuli Selatan	572.097.968.000	592.764.058.000	654.669.272.000	327.334.626.000
4	Kab Simalungun	1.077.985.764.000	1.084.973.726.000	1.230.816.187.000	717.976.084.000
5	Kab Asahan	795.350.930.000	817.746.952.000	891.746.952.000	519.837.726.000
6	Kab Karo	686.834.562.000	697.458.392.000	751.581.176.000	432.159.157.800
7	Kab Dairi	532.723.259.000	560.602.194.000	623.702.235.000	356.030.010.400

8	Kota Binjai	526.069.678.00 0	541.895.577.000	574.469.158.00 0	287.234.568.000
9	Kota Tebing Tinggi	385.030.433.00 0	400.236.724.000	432.437.231.46 4	250.514.423.065
10	Kota Sibolga	371.812.825.00 0	380.075.078.000	412.805.887.00 0	230.483.276.300

Sumber : Data diperoleh dari Kementerian Keuangan Sumatera Utara, 2019

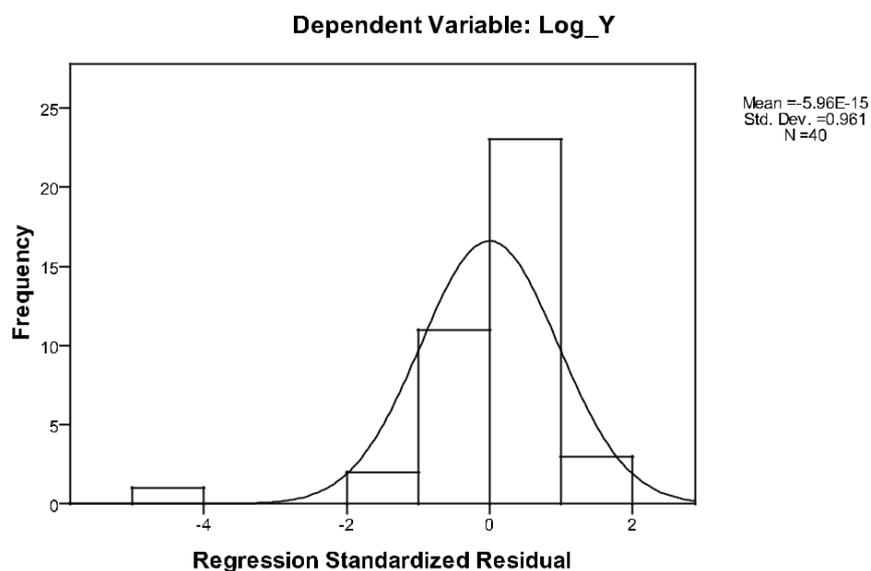
Berdasarkan tabel diatas dana alokasi umum mengalami fluktuasi. Dana alokasi umum tertinggi terletak di Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 1.230.816.187.000, sedangkan dana alokasi umum terendah terletak di Kabupaten Nias sebesar Rp. 244.784.649.576. Penurunan dana alokasi umum terjadi karena adanya devisit APBN yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut berimbas pada perhitungan ulang alokasi dana kegiatan setiap dinas.

c. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah penelitian memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengintepretasi hasil dari analisis regresi dan diperoleh adanya ketetapan model. Dalam pengujian asumsi klasik digunakan asumsi-asumsi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

d. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi yang dibentuk dari variabel dependen dan variabel independen yang mempunyai distribusi normal. Berikut ini adalah gambar dari hasil uji normalitas yaitu:



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas.

Sempurna maka disebut dengan multikolinearitas sempurna (*perfect multicollinearity*), berarti model kuadrat terkecil tersebut tidak bisa digunakan. Multikolinieritas dapat diketahui dengan menganalisis nilai toleransi serta *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu variabel dapat dikatakan terbebas dari asumsi multikolinieritas apabila nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2013).

e. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Pelaksanaan desentralisasi fiskal, menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula, sehingga pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih efisien dalam memberikan kepentingan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil ini juga konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Pungky (2011) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh belanja modal yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan pertumbuhan ekonomi justru mengalami peningkatan, tetapi sebaliknya data belanja modal mengalami penurunan.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini konsisten dengan hasil oleh Pungky (2011). Pemerintah daerah sebaiknya harus menggali potensi kekayaan daerahnya tersebut, dengan begitu maka daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang tinggi. Semakin besar upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah yang dilakukan suatu daerah, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakannya. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Daerah yang sah bertujuan untuk memberikan keleluasaan pemerintah daerah dalam membiayai belanja modalnya, selain menggunakan transfer dari pemerintah pusat mereka juga bisa menggunakan dananya sendiri yaitu pendapatan asli daerah.

E. KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai t hitung sebesar -3.373 dengan nilai signifikansi sebesar 0.002 , dimana nilai sig di

di bawah 0.05, sehingga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal.

2. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai t hitung sebesar 0.879 dengan nilai signifikansi sebesar 0.385 dimana nilai sig diatas 0.05, sehingga variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal.
3. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel dana alokasi umum memiliki t hitung sebesar 3.759 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001, dimana nilai sig di bawah 0.05, sehingga dana alokasi umum berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal.
4. Dari pengujian yang dilakukan juga diperoleh f hitung sebesar 19.409 dengan tingkat signifikansi 0.000 jauh lebih kecil dari 0.05. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Atika, D. Saraswati, H Chrisna, HAP Nasution, S Pipit Buana (2018). Sukuk Fund Issuance On Sharia Banking Performance In Indonesia. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(9), 1531-1544.
- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardhani Pungki. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Skripsi: Universitas Diponegoro*.
- Arif Purnama. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten di Jawa Tengah Periode 2012-2013. *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Pertumbuhan Ekonomi*. Sumatera Utara.
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1): 87-100.
- Daulay, M. T., Elfindri, Sjafrizal, & Sofyardi. (2018). 1. An Empirical Investigation of Business Diversification and Economic Value on Poverty in Batubara Regency, North Sumatera, Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*: 841-859.
- Daulay, M. T., Sanny, A., Rini, E. S., & Sadalia, I. (2018). FACTORS THAT INFLUENCING THE SATISFACTION AND LOYALTY OF SILKAIR INTERNATIONAL FLIGHT SERVICE PASSENGERS AT KUALANAMU

AIRPORT, DELI SERDANG, INDONESIA. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*: 1-10.

Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rusdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose (ESP)* Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2): 190-201.

Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Pemerintah*.

Kesuma, M. A., Lubis, S., Iskandarini, & Daulay, M. T. (2019). The Influence Of Organizational Restructuring On Employee Performance In The Housing And Residential Areas, North Sumatra Province, Indonesia. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*: 32-36.

